

SKRIPSI

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN
DI DESA TOMPOTANA KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
KABUPATEN TAKALAR**

Disusun dan diusulkan oleh

SYAMSINAR

Nomor Stambuk: 105 640 1932 14



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan di Desa Tompotana, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.
Nama Mahasiswa : Syamsinar
Nomor Stambuk : 1056401932 14
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

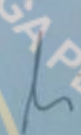

Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

Mengetahui :

Dekan Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah Diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar 028/FSP/A.3-VIII/V/40/2019 Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Sabtu, Tanggal 25 Mei 2019.

TIM PENJILAI

Ketua Sekretaris

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

Dr. Hj. Ikhvan Malik, S.Sos., M.Si
Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

1. Dr. H. Muzamir, M.Si (Ketua)
2. Dr. Hj. Budi Setiawan, M.Si
3. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si
4. Ahmad Harakan, S.IP., M.HI



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Syamsinar

Nomor Stambuk : 105640 1932 14

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 17 Februari 2019

Yang Menyatakan,


Syamsinar

ABSTRAK

Syamsinar. 2019. Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan di Desa Tompotana Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar, (Dibimbing oleh Budi Setiyawati dan Nuryanti Mustari.)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, serta faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di Desa. Lokasi penelitian berada di Desa Tompotana, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Desain penelitian studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung terhadap informan berjumlah 8 (delapan) orang yang dianggap mampu memberikan keterangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta data lainnya berupa dokumentasi yang dianggap mendukung. Kemudian data tersebut dikumpul dan disusun secara jelas dan sistematis dalam rangka menyusun skripsi dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai. Teknik analisis data dilakukan melalui 4 (empat) tahap yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Desa Tompotana masih sangat memperhatikan dimana upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan perempuan itu sendiri masih tergolong lemah karena hambatan-hambatan masih sering terjadi dan berulang kali, sehingga belum ada hasil yang terlihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat proses pemberdayaan seperti saat pelatihan. Sehingga program-program yang telah direncanakan tidak terealisasi dan tidak berlangsung lama atau berkesinambungan, dan teratur. Meski demikian, pemberdayaan perempuan di desa Tompotana tetap terlaksana seperti saat perempuan ikut serta dalam pelatihan kursus menjahit, pengolahan makanan, dan pelatihan keagamaan, mengurus jenazah.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Perempuan, Pembangunan

KATA PENGANTAR



"Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh"

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas Rahmat dan Karunia yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan di Desa Tompotana Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar”. Salam serta Salawat atas Junjungan kita, Nabiyullah Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Nabi yang telah menghantarkan kita dari zaman gelap gulita ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Yang telah membimbing kita keluar dari zaman kebodohan, yang kasih sayang pada umatnya tak tertandingi oleh manusia manapun.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang di ajukan penulis untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari kedua orang tua, Ibunda tercinta **Fitriani Dg Sannang** dan Ayahanda **Indar Dg Razak** serta segenap keluarga besar **Dg Made**, saudara-saudara saya yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil. Kepada Ibunda **Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si.** selaku Pembimbing I dan Ibunda **Dr. Nuryanti Mustari S.IP., M.Si.** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu pada

kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimah kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Abdur Rahman Rahim S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Nuryanti Mustari S.Ip., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Sahabat-sahabat kecilku sekaligus sepupuku, Darma WatiMus dan Heni Pattaraja dan juga sahabatku sedari SMA Sitti Asriani (Eny) yang senantiasa mendukung dan saling mendoakanku agar bisa sarjana sama-sama.
5. Saudara-saudariku se- Unismuh, se- Sospol, dan khususnya se- Ilmu Pemerintahan yang memberiku ruang untuk mengenal banyak hal, daerah, bahasa, suku, dan budaya. Memberiku ruang untuk mengerti bagaimana kehidupan itu sebelum memasuki kehidupan yang sesungguhnya.
6. Saudara tak sedarahku Kelas B Ilmu Pemerintahan'14! Terima kasih *guys* kebersamaannya selama ini, MasyaAllah saya bahagia dan bersyukur dipertemukan kalian. Khususnya sahabat-sahabatku Khia, Ita, Elis, Katty, Dian, Ibell, Raisa, Iciss, Selly, Amma, Miftah, Windis, Agus, Ayi, Maksum, Kakak An (Surianto) yang sudah seperti kakak sendiri, Alm. Kakak Abul, dan Surya. Terima kasih juga buat Babas yang seringkali hadir saat saya kesulitan masalah ekonomi.
7. Dan teruntuk partnerku di Ruang Baca IP sekaligus Dosen andalanku dan andalan se Ilmu Pemerintahan, Bapak Muhammad Ahsan Samad, yang

memberikan ruang pada saya dalam memperoleh ilmu kehidupan yang sesungguhnya, ruang untuk bertemu lebih banyak saudara, bertemu orang-orang hebat MasyaAllah, pengalaman yang luar biasa pengaruhnya bagi perjalanan hidup saya, sekarang dan nanti. Jazakallahu Khairan Katsiiran, pak.

Dan seluruh rekan serta pihak yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan doanya. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan oleh itu, saran, kritik serta umpan balik diharapkan agar skripsi ini mendekati sempurna. Semoga segala bantuan pihak, petunjuk dorongan dan pengorbanan yang telah diberikan memungkinkan terselesaikannya skripsi ini bernilai ibadah dan memperoleh imbalan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aamiin ...!!

Makassar, 17 Februari

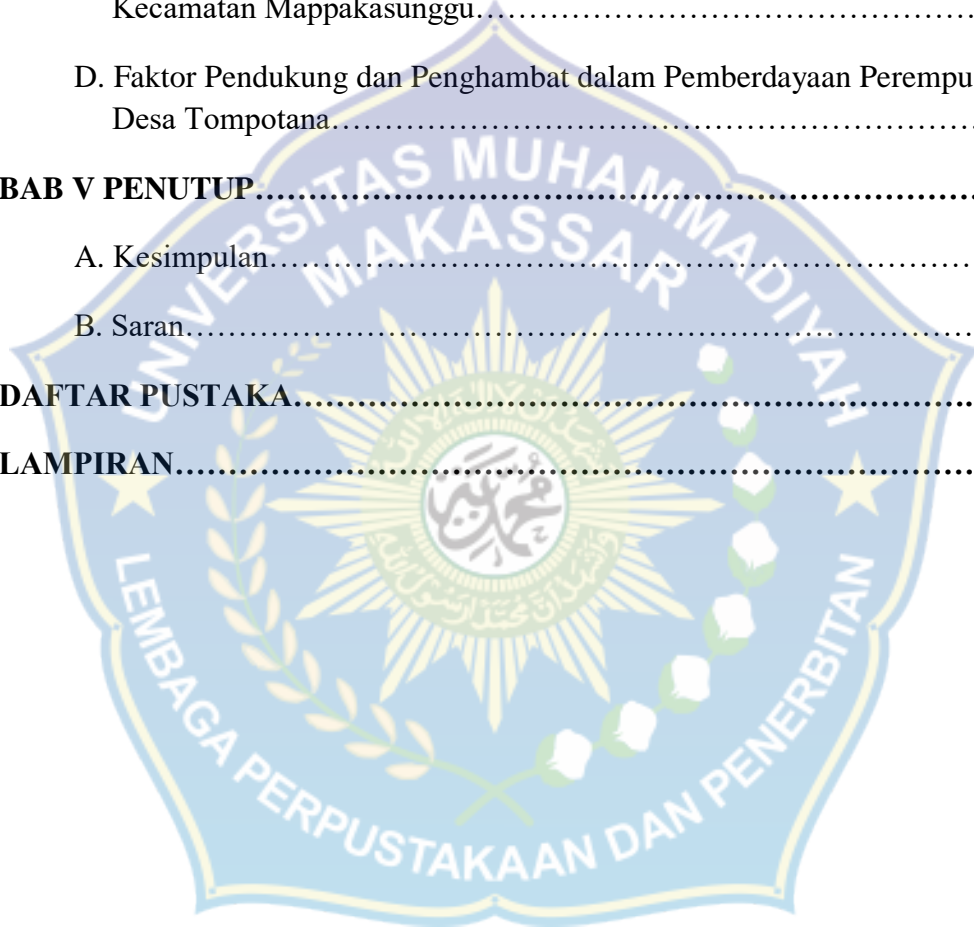
Penulis

Syamsinar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Luaran Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Konsep Pemberdayaan Perempuan	8
1. Proses Pemberdayaan	10
2. Tujuan Pemberdayaan	10
3. Tahapan Pemberdayaan	11
B. Konsep Pembangunan	21
C. Kerangka Pikir	31
D. Fokus Penelitian	33
E. Deskripsi Fokus Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	36
B. Jenis Dan Tipe Penelitian	36
C. Sumber Data	37
D. Informan Penelitian	37

E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	39
G. Pengabsahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Profil Desa Tompotana.....	42
B. Keadaan Demografi.....	43
C. Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Di Desa Tompotana, Kecamatan Mappakasunggu.....	55
D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Tompotana.....	66
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	xii
LAMPIRAN.....



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1 Informan Penelitian	38
Tabel 4.1 Daftar Kepala Desa Yang Menjabat.....	43
Tabel 4.2 Luas Wilaya Berdasarkan Penggunaan Lahan	45
Tabel 4.3 Potensi Pendapatan.....	45
Tabel 4.4 Sumber Daya Alam	46
Tabel 4.5 Sumber Daya Manusia	46
Tabel 4.6 Sumber Daya Pembangunan	48
Tabel 4.7 Sumber Daya Sosial	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
GAMBAR 2.1 KERANGKA PIKIR	33
GAMBAR 3.1 MODEL ANALISIS INTERAKTIF	40
GAMBAR 5.1 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA TOMPOTANA KECAMATAN MAPPAKASUNGGU KABUPATEN TAKALAR	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya perempuan merupakan sumberdaya manusia yang memiliki potensi dan dapat di dayagunakan dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan nasional. Perkembangan populasi penduduk perempuan di Indonesia pada sisi tertentu sering dipandang sebagai masalah kependudukan. Namun, disisi lain justru memandang perkembangan populasi penduduk perempuan ini sebagai asset pembangunan. Saat ini, fenomena perempuan bekerja bukan lagi sesuatu yang aneh bahkan dapat dikatakan sudah merupakan tuntutan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam dunia kerja, dimana hal tersebut dapat menaikkan harkat perempuan yang sebelumnya selalu dianggap semata-mata sebagai pengurus anak, suami, dan rumah tangga saja, sebagai pembahasan yang terabaikan pada lingkungan, bodoh, dan kurang memiliki kemampuan yang pada akhirnya merendahkan martabat perempuan.

Kaum perempuan pada masyarakat miskin selalu berupaya melepaskan diri dari belenggu kesulitan ekonomi dan mengusahakan kehidupan ekonomi yang lebih baik dalam bentuk atau kiat-kiat tertentu dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Perempuan merupakan potensi dan asset desa yang memiliki peranan dalam peningkatan kesejahteraan umum. Pemerintah desa perlu memberikan perhatian serius untuk memberdayakan perempuan desa melalui pelibatan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses kebijakan pembangunan desa. Pemberdayaan dan peningkatan

kualitas sumberdaya manusia khususnya perempuan desa sangat mungkin dilakukan melalui berbagai kegiatan guna memberdayakan perempuan baik secara ekonomi, sosial, politik dan psikologis.

Desa Tompotana adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, yang berada di Kepulauan Tanakeke, yang merupakan hasil pemekaran dari desa Maccinibaji dengan jumlah penduduk sebanyak 1.068 jiwa yang terdiri dari 551 laki-laki dan 517 perempuan. Sebanyak 210 ibu rumah tangga yang bekerja hanya sebagai penguru rumah tangga, 33 Janda, 211 perempuan tidak tamat SD. 190 tamat SD, 107 tamat SMP, dan sebanyak 9 perempuan tamat perguruan tinggi. Secara umum, Tipologi desa Tompotana terdiri dari potensi sumberdaya alam berupa Peternakan, Nelayan, Kerajinan dan Industri sedang, Jasa dan Perdagangan (Profil Desa Tompotana tahun 2016).

Penetapan kebijakan desentralisasi desa memberikan ruang yang luas bagi desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Masyarakat desa tanpa terkecuali termasuk perempuan dapat terlibat sebagai subyek dalam pembangunan desa. Namun, pada realitanya keterlibatan tersebut belum dilaksanakan dengan optimal pada masing-masing desa. Kondisi tersebut yang juga tercermin dalam keterlibatan perempuan di Desa Tompotana dalam aktifitas pembangunan yang masih rendah sebagai ibu rumah tangga, buruh ikat rumput laut, maupun berdagang kecil-kecilan di rumah. Selain itu, beberapa aktifitas lainnya yang mereka lakukan adalah mengikuti arisan atau hanya sekedar mengobrol sesuatu yang tidak terlalu penting untuk dibahas.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa aktifitas perempuan desa cenderung terbatas dan pasif untuk terlibat dalam pembangunan desa baik secara langsung maupun tidak langsung. Disisi lain, perempuan seringkali dihadapkan pada masalah rumah tangga terutama masalah ekonomi yang tidak jarang mengakibatkan mereka terlilit utang piutang. Dukungan undang-undang dapat membangkitkan partisipasi perempuan desa. Namun, partisipasi dan kapasitas perempuan Desa Tompotana masih perlu ditingkatkan dalam memperjuangkan kebutuhan mereka dalam pembangunan desa. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan. Dalam hal ini proses pemberdayaan menekankan pada aspek ekonomi.

Mengingat perlunya sebuah pemberdayaan bagi perempuan, maka perlu adanya sinergitas antara pemerintah desa Tompotana dengan masyarakat dan perempuan itu sendiri, sehingga dapat melahirkan berbagai program yang teratur, nyata, dan berkesinambungan bagi pemberdayaan perempuan guna mensejahterakan kehidupan keluarga.

Berdasarkan observasi dan pengamatan langsung oleh peneliti, pemberdayaan perempuan pernah dilakukan oleh salah satu lembaga Swasta, termuat dalam penjelasan oleh salah satu anggota dari lembaga tersebut, Tono Nobunaga, bercerita, “Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang pemanfaatan sumberdaya pesisir di beberapa dusun, di desa yang ada di kepulauan Tanakeke merupakan rangkaian dari program *Restoring Coastal Livelihood* (RCL) atau disebut juga restorasi penghidupan pesisir yang di inisiasi oleh Oxfam Makassar yang bermitra dengan Yayasan Konservasi Laut Indonesia (YKL-I) di Kabupaten Takalar dan Kabupaten Maros. Lokasi dusun

yang menjadi wilayah implementasi program yaitu, dusun Tompotana dan dusun Cambayya pada desa Tompotana, dusun Dande-dandere pada desa Mattiro Baji, serta dusun Lantang Peo dan dusun Rewatayya pada desa Rewatayya.” (Tono, 2012).

Lanjutnya, “tujuan program RCL adalah meningkatkan pengamanan mata pencaharian bagi masyarakat pesisir melalui kemitraan multi stakeholder yang diharapkan mampu meningkatkan upaya pengelolaan pesisir termasuk pemanfaatan sumberdaya mangrove. Atau dalam bahasa yang lebih gamblang, mendorong pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada di sekitar mereka dengan lebih baik lagi. Dalam pelaksanaan, program akan memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan perempuan pesisir, kesetaraan gender, perlindungan hak-hak perempuan pesisir dalam peningkatan ekonomi masyarakat pesisir.” (Tono, 2012).

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa program pemberdayaan perempuan dalam peningkatan ekonomi di kepulauan Tanakeke, khususnya desa Tompotana, pernah dilaksanakan oleh *Restoring Coastal Livelihood* (RCL) atau disebut juga restorasi penghidupan pesisir yang di inisiasi oleh Oxfam yang bermitra dengan YKL-I, yang bermitra dengan pemerintah setempat. Meskipun program tersebut tidak berlangsung lama atau tidak dalam jangka panjang.

Dalam penelitian Farida (2009: 15), ia mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah seperti pemberian modal, baik secara tetap dan bergulir belum mampu memberikan perubahan terhadap perempuan,

sebaliknya hanya akan membuat ketergantungan pada pemerintah semakin besar. Penguasa masih belum menunjukkan partisipasi yang sungguh-sungguh terhadap kegiatan industri perempuan desa. Belum ada program terpadu dengan instansi terkait secara nyata dengan jadwal yang teratur dan berkesinambungan.

Penelitian ini berusaha mengkaji dan menganalisis pemberdayaan perempuan bagi kelompok ibu-ibu di desa Tompotana baik yang masih memiliki suami maupun yang sudah tidak memiliki suami atau sering diistilahkan dengan sebutan janda, dimana mereka hanya bekerja sebagai pengurus rumah tangga. Serta faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan. Karena dengan adanya pemberdayaan perempuan maka akan terjadi keseimbangan dalam pembangunan di desa. Hal ini sejalan dengan Permen No. 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 3 (b) mendorong keterlibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan; (d) mendorong program-program yang dapat meningkatkan kemandirian perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, serta bidang strategis lainnya. Mengacu pada Peraturan Menteri tersebut maka perempuan wajib terlibat pada setiap tahapan dalam pemerintahan, perempuan harus mampu berdaya sehingga ia bukan hanya sebagai obyek pembangunan, namun juga sebagai subjek.

Berdasarkan Informasi dan pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul: ***“Pemberdayaan Perempuan dalam***

Pembangunan di Desa Tompotana, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, kajian ini akan difokuskan dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Prinsip-prinsip Pemberdayaan Perempuan di Desa Tompotana?
2. Faktor-faktor Apa yang Mendukung dan Menghambat Pemberdayaan Perempuan di Desa Tompotana?

C. Tujuan Penelitian

Dengan latar belakang dan permasalahan penelitian yang ada, maka secara spesifik penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk Mengetahui Prinsip-prinsip Pemberdayaan Perempuan di Desa Tompotana.
2. Untuk Mengetahui Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pemberdayaan Perempuan di Desa Tompotana.

D. Luaran Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Luaran Teoritis

Dapat memberikan masukan kepada perempuan dan pemerintah tentang bagaimana melakukan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di desa.

2. Luaran Praktis

Sebagai bahan rujukan dan referensi yang dapat memperluas cakrawala berpikir bagi kajian sejenis yang lebih mendalam di masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- menjadi kata “berdaya” yang berarti memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, dan berdaya artinya memiliki kekuatan. Kata berdaya apabila diberi awalan pe- dan sisipan -m- serta akhiran -an menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau memiliki daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari “*empowerment*” yang berasal dari bahasa Inggris, sedangkan menurut Merriam Webster dalam Oxford English Dictionary mengandung dua pengertian, yaitu, (a) *to give ability or enable to*, yang diterjemahkan sebagai member kecakapan atau kemampuan atau memungkinkan untuk; (b) *to give power or authority to* yang berarti memberi kekuasaan (Wiwik, 2014).

Hogan dalam Adi (2012) menjelaskan bahwa dalam konteks kesejahteraan sosial, pemberdayaan terkait dengan upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dari suatu tingkatan ke tingkatan yang lebih baik. Tentunya dengan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan suatu komunitas menjadi kurang berdaya (*depowerment*).

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan. Dalam perspektif pembangunan ini, disadari betapa penting kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan nonmaterial. Sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai kegiatan membantu klien untuk

memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya (Payne, 1997: 266 dalam Firdaus, 2012)

Sementara itu Iffe (1995: 182 dalam buku “community development: creating community alternatives-vision, analysis and practice”) memberikan batasan pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka.

Sutrisno (2000:185) menjelaskan, dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. Perbedaannya dengan pembangunan partisipatif adalah keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan program, sedangkan dana tetap dikuasai oleh pemerintah.

1. Proses Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. (Soeharto, 2005).

Sedangkang menurut Mardikanto (2014), terdapat enam (6) tujuan pemberdayaan Masyarakat, yaitu:

- a. Perbaikan Kelembagaan (*better institution*). Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- b. Perbaikan Usaha (*better business*). Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan akses bisnilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan mempengaruhi bisnis yang dilakukan.
- c. Perbaikan Pendapatan (*better income*). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
- d. Perbaikan lingkungan (*better environment*). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan social), karena

kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

- e. Perbaiki kehidupan (*better living*). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- f. Perbaiki Masyarakat (*better community*). Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

3. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pendapat lain dari Totok Mardikanto (2010) mengemukakan bahwa tahapan dalam pemberdayaan masyarakat memiliki 4 tahapan, antara lain:

- a. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksud agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan. Proses tersebut meliputi:
 - 1) Persiapan masyarakat dan pemerintahan setempat untuk melakukan pertemuan awal dan teknis pelaksanaannya
 - 2) Persiapan penyelenggaraan pertemuan
 - 3) Pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan
 - 4) Pembahasan hasil dan penyusunan rencana tindak lanjut

b. Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian meliputi:

- 1) Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah
- 2) Identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik
- 3) Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah
- 4) Pengembangan rencana kegiatan serta perorganisasian pelaksanaan

c. Menerapkan rencana kegiatan kelompok

Rencana yang telah disusun bersama-sama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan

d. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif (participatory monitoring dan evaluation/PME). PME ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan dengan tujuannya. PME adalah proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan, baik prosesnya (pelaksanaanya) maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan.

Meskipun rumusan konsep pemberdayaan berbeda-beda antara ahli yang satu dengan yang lainnya, tetapi pada intinya dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebagai upaya berencana yang dirancang untuk merubah atau melakukan pembaruan pada suatu komunitas atau masyarakat dari

kondisi ketidakberdayaan menjadi berdaya dengan menitikberatkan pada pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat. Dengan demikian mereka diharapkan mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam menentukan masa depan mereka, dimana provider dari pemerintah dan lembaga non pemerintah (lembaga swasta) hanya mengambil posisi partisipan, stimulan, dan motivator.

Schuler, dkk (dalam Firdaus, 2012) mengembangkan beberapa Indikator Pemberdayaan yang mereka sebut *empowerment index* atau indeks pemberdayaan.

- a) Kebebasan Mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendiri.
- b) Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu) atau kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo, dll). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya atau orangtuanya, terlebih jika ia dapat membelibarang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- c) Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, radio, pakaian keluarga dan lain-lain. Seperti halnya indikator di atas, pointinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan

sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

- d) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, memperoleh kredit usaha, dan lain-lain.
- e) Kebebasan relatif dan dominan keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja diluar rumah.
- f) Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah Kelurahan/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- g) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
- h) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin

tinggijika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah daripasangannya

Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan dalam arti mendorong orang untuk menampilkan dan merasakan hak-hak asasinya. Didalam pemberdayaan terkandung unsur pengakuan dan penguatan posisi seseorang melalui penegakan hak dan kewajiban yang dimiliki dalam seluruh tatanan kehidupan. Proses pemberdayaan diusahakan agar orang lain berani menyuarakan dan memperjuangkan ketidak seimbangan hak dan kewajiban. Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dan orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan. (Indriyati, dkk, 2009).

Menurut Martina (2016), prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Penyadaran

Penyadaran berartimembangun masyarakat dari keterbelakangan dan tidak memikirkan masa depan. Penyadaran juga berarti bahwa masyarakat secara keseluruhan menjadi sadar bahwa mereka mempunyai tujuan dan masalah-masalah. Masyarakat mulai sadar dan menemukan peluang-peluang untuk dimanfaatkannya, menemukan sumberdaya-sumberdaya yang ada di tempat itu yang barangkali sampai saat ini tidak pernah dipikirkan orang.

2. Pelatihan

Yaitu Belajar untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan bertani, kerumah tanggaan, industri, dan cara menggunakan pupuk. Belajar untuk mengetahui bagaimana memakai jasa bank, bagaimana membuka rekening.

3. Pengorganisasian

Berarti bahwa segala hal yang dikerjakan secara teratur, ada pembagian tugas diantara individu-individu yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas masing-masing, dan ada kepemimpinan yang tidak hanya terdiri dari segelintir orang, tapi kepemimpinan diberbagai tingkatan.

4. Pengembangan Kekuatan

Kekuasaan berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Jika masyarakat mempunyai kekuatan, setengah perjuangan untuk pembangunan sudah dimenangkan. Tetapi perlu ditekankan, kekuatan itu benar-benar harus dari masyarakat, bukan dari satu atau dua orang pemimpin saja. Kekuatan harus mengontrol kekuasaan para pemimpin.

5. Membangun Dinamika

Dinamika orang miskin berarti bahwa masyarakat itu sendiri yang memutuskan dan melaksanakan program-programnya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat dan diputuskan sendiri.

Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga agas atau matra pemberdayaan (empowerment setting): mikro, mezzo, dan makro.

a) Aras Mikro.

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai Pendekatan yang Berpusat pada Tugas (taskcentered approach).

b) Aras Mezzo.

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

c) Aras Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (large-system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. (Firdaus, 2012).

Kemudian Sumodiningrat (1997:165) menyatakan, bahwa pemberdayaan masyarakat bertalian erat dengan upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan, seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Upaya memberdayakan masyarakat tersebut harus dilakukan melalui tiga cara yaitu:

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan

motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*).

Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya dalam memanfaatkan peluang.

3) Memberdayakan juga berarti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah. Jadi pemberdayaan memerlukan cara-cara atau langkah-langkah konkrit untuk mewujudkannya. Tanpa langkah-langkah yang tepat, upaya pemberdayaan akan mengalami banyak kendala.

Kata wanita dalam etimologi Jawa itu berasal dari ‘wani ditoto’ alias berani diatur. Menurut Dictionary Zoetmulder (Riyani dkk, 2015: 22) kata wanita berarti ‘yang diinginkan’. Arti kata perempuan dari bahasa asalnya, Sanssekerta, berasal dari kata per-empu-an. Per itu berarti makhluk, Empu berasal dari kata Sansekerta yang berarti mulia, berilmu tinggi, pembuat suatu karya agung. Leluhur bangsa ini pun sudah memberikan makna dalam kata perempuan sebagai bentuk penghormatan tinggi kepada kaum wanita (Riyani dkk, 2015: 22)

Perempuan memiliki peran yang penting dalam pembangunan nasional. Salah satu upaya untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan nasional adalah dengan pemberdayaan. Pada pendekatan pemberdayaan ini, diasumsikan bahwa jika ingin memperbaiki posisi tawar perempuan, maka

dibutuhkan suatu upaya untuk meningkatkan kekuasaannya untuk tawar menawar dan untuk merubah sendiri nasibnya. Artinya, pendekatan ini menghendaki pelibatan kaum perempuan tidak saja sebagai objek tetapi juga sebagai subjek/peaku aktif, sebagai orang yang merumuskan sendiri apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Beberapa ahli studi perempuan menyatakan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan posisi *bargaining* perempuan adalah melalui pengorganisasian, yang dianggap sebagai langkah yang konkrit untuk memberdayakan perempuan itu secara lebih baik (Pratama, 2013: 12).

Diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya menjadi dasar bagi upaya pemberdayaan perempuan. Tidak dapat dipungkiri, pemiskinan terhadap perempuan oleh ideologi gender patriarki memposisikan perempuan sebagai anggota masyarakat yang tidak beruntung dan kerap mengalami ketidakadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka ide utama pemberdayaan perempuan bermuara dari konsep pengarusutamaan gender, kesetaraan gender, dan keadilan. (Retno dan Maheni, 2011).

Undang-Undang Dasar 1945 yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah pada dasarnya mengandung prinsip persamaan hak dan kewajiban bagi laki-laki maupun perempuan tanpa adanya perbedaan dalam segala bidang. Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pergeseran Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

terhadap Wanita dinyatakan bahwa tujuan untuk mencapai kedudukan setara (equal status) perempuan sebagai peserta, pengambil keputusan dan penikmat didalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan dinyatakan untuk memberdayakan (empower) perempuan dan laki-laki perlu kerjasama sebagai mitra sejajar dan memberi inspirasi kepada generasi baru kaum perempuan dan laki-laki untuk bekerja sama demi kesetaraan, pembangunan berkelanjutan dan perdamaian. (Roesmidi dan Riza, 2006 dalam Wiwik 2014).

Konsep pemberdayaan sebagai paradigma, sebenarnya juga telah dikaji oleh Moser (1993) dalam Farida (2009). Menurutnya, bahwa inti strategi pemberdayaan sesungguhnya bukan bermaksud menciptakan kaum perempuan lebih unggul daripada kaum laki-laki. Pendekatan pemberdayaan ini menyadari pentingnya meningkatkan kekuasaan perempuan. Namun pendekatan ini lebih berupaya untuk mengidentifikasi kekuasaan, bukan sekedar dalam kerangka dominasi yang satu terhadap yang lain, melainkan lebih dalam kerangka kapasitas perempuan untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal.

Menurut (Pratama, 2013 :13-14) Terdapat beberapa faktor yang dianggap memiliki peran penting dalam pemberdayaan perempuan pedesaan, yaitu sebagai berikut;

1. Peran serta pemerintah, Pemerintah mempunyai andil yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, bagaimanapun dalam suatu masyarakat pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai *power* untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
2. LSM, saat ini banyak sekali LSM yang berkembang di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial. Sudah banyak peren nyata yang dilakukan

LSM terutama dalam pemberdayaan perempuan yang mampu menjangkau hal-hal yang belum tersentuh program pemerintah.

3. Pembentukan *Local Community Organization* oleh perempuan, akan meningkatkan posisi *bargaining* perempuan. Di samping itu ketika mereka berkumpul mereka dapat merumuskan sendiri apa yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga dengan kesamaan tujuan program pemberdayaan akan lebih mudah mencapai sasaran.
4. Koperasi, koperasi merupakan sarana penting yang dapat membantu memperdayakan perempuan, terutama dalam meningkatkan kemampuan berorganisasi dan akses dalam memperoleh kredit.

PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai motor penggeraknya untuk membangun keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat guna menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan, dan membina keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera (Agnes dkk, 2016: 147).

Sedangkan menurut Sukei (1999) dalam Weni (2015) mengatakan bahwa dalam mengukur pemberdayaan perempuan perlu memperhatikan lima dimensi dibawah ini:

1. Dimensi kesejahteraan, dapat diukur dengan mengetahui terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, perumahan, dan sebagainya. Perempuan desayang terpenuhi kebutuhan makanannya, kesehatan, dan perumahan secara tak layak dapat dikatakan telah mencapai

kesejahteraan. Sebaliknya, apabila belum terpenuhi kebutuhan tersebut dapat dikatakan belum sejahtera.

2. Dimensi akses atas sumberdaya, dengan mengukur akses atas modal, produksi, informasi, keterampilan, dan lainnya. Perempuan memiliki kemudahan akses untuk mendapatkan modal usaha dalam memproduksi barang atau jasa, serta memperoleh informasi untuk mengembangkan usahanya, serta mengasah keterampilan maupun bakat yang dimiliki perempuan.
3. Dimensi penyadaran atau kesadaran kritis untuk mengetahui ada tidaknya upaya penyadaran terhadap adanya kesenjangan gender yang disebabkan faktor sosial budaya yang sifatnya dapat dirubah. Upaya penyadaran tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat umum maupun perempuan desa yang memiliki pemahaman kritis terhadap konsep gender. Sehingga faktor sosial budaya yang menghambat dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Kesadaran kritis tentang gender perlu dibangun secara berkelanjutan.
4. Dimensi partisipasi yaitu mengetahui ada tidaknya kesenjangan gender dalam partisipasi yang ditunjukkan oleh terwakili atau tidaknya perempuan dalam wadah atau lembaga yang terkesan elit. Perempuan desa harus ada yang duduk di lembaga elit pemerintahan desa. Sehingga dapat menyuarakan aspirasi dan kebutuhan perempuan desa.
5. Dimensi kontrol, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan terhadap alokasi kekuasaan pada segala bidang kegiatan. Dimensi kontrol ini dapat dilakukan oleh pemerintah,

masyarakat umum maupun perempuan itu sendiri untuk memastikan kepentingan perempuan terwadahi disegala bidang kehidupan.

Menurut Friedman (1992) dalam Weni (2015), Pemberdayaan mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis. Yang dimaksud dengan pemberdayaan sosial yaitu suatu usaha bagaimana perempuan memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan keterampilan, akses untuk berprestasi dalam organisasi sosial dan akses ke sumber-sumber keuangan. Sedangkan yang dimaksud dengan pemberdayaan politik, yaitu usaha bagaimana perempuan dapat memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka. Dan yang dimaksud dengan pemberdayaan psikologis yaitu usaha bagaimana membangun kepercayaan diri perempuan.

B. Konsep Pembangunan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam kegiatan pembangunan yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara pembangunan, perencanaan pembangunan kerap ditengarai sebagai titik signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia. Karena perencanaan akan membawa pada suatu pilihan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan dengan perencanaan yang baik pada akhirnya dapat menghasilkan suatu pembangunan yang efektif, efisien, serta tepat sasaran. Untuk itu, dalam melaksanakan perencanaan pembangunan diperlukan unsur-unsur penting didalamnya (Masruhen dkk, 2013 : 5)

Perencanaan merupakan tahap awal dalam kegiatan pembangunan yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara

pembangunan. Perencanaan pembangunan kerap ditengarai sebagai titik signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia. Karena perencanaan akan membawa pada suatu pilihan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pembangunan (Huraerah, 2011 : 79).

Menurut Abe (Apriliani, 2015:20-21), dalam melakukan suatu perencanaan yang baik maka harus memuat prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Apa yang akan dilakukan, yakni jbaran visi dan misi;
- b. Bagaimana mencapai hasil tersebut;
- c. Siapa yang akan melakukan;
- d. Lokasi aktifitas;
- e. Kapan akan dilakukan dan berapa lama;
- f. Sumber daya yang dibutuhkan.

Lebih lengkap pendapat yang dikemukakan oleh Syamsi dalam Surjono dan Nugroho, bahwa perencanaan yang baik dan lengkap harus memenuhi 6 (enam) unsur sebagai berikut.

1. Apa (what), yakni mengenai materi kegiatan apa yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan;
2. Mengapa (Why), yaitu alasan mengapa memilih dan menetapkan kegiatan tersebut dan mengapa diprioritaskan;
3. Bagaimana dan berapa (*how and how much*), yaitu mengenai cara dan teknis pelaksanaan bagaimana yang dibutuhkan untuk dilaksanakan dan dengan dana yang tersedia harus dipertimbangkan;
4. Dimana (*where*), yakni pemilihan tempat yang strategis untuk pelaksanaan kegiatan (proyek);

5. Kapan (*when*), yaitu pemilihan waktu/timing yang tepat dalam pelaksanaannya;
6. Siapa (*who*), menentukan siapa orang yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Ini merupakan subyek pelaksana. Kadang-kadang diperlukan juga untuk menentukan siapa yang menjadi obyek pelaksana kegiatan.

Santoso dan Gianawati (Masruhen dkk, 2013: 6-7), mengemukakan bahwa didalam kegiatan pembangunan yang mengutamakan partisipasi masyarakat akan membawa manfaat, yaitu:

- a. Efisien, karena sumberdaya serta kemampuan lokal dapat dipergunakan serta pelibatan masyarakat sejak awal membantu perencanaan yang disusun tepat sasaran;
- b. Efektif, karena masyarakat lokal lebih memahami kondisi, potensi danpermasalahannya, serta kebutuhannya lebih teridentifikasi;
- c. Menjamin kemitraan, karena akan tercipta rasa saling percaya antar pelakupembangunan, sehingga dialog dan konsensusakan terwujud untuk meraih tujuan yang disepakati bersama;
- d. Memberdayakan kapasiatas, terjalin lewat upayanegosiasi (dialog) dan pengelolaanpembangunan;
- e. Memperluas ruang lingkup, karena masyarakatakan memahami tanggung jawabnya danberusahamengembangkan aktifitaspembangunan;
- f. Meningkatkan ketepatan kelompok sasaran,karena akan meningkatkan ketepatan dalam mengidentifikasi kelompok sasaran (targeting) dari berbagai program pembangunan;

- g. Berkelanjutan, karena masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan ikut serta menjaga proses maupun hasil pembangunan;
- h. Memberdayakan kelompok marjinal, karena mereka memiliki kesempatan untuk dapat mengambil peran dalam menentukan kegiatan pembangunan yang tepat untuk mereka;
- i. Meningkatkan akuntabilitas, karena jikadilakukan secara sungguh-sungguh akanmeningkatkan kepercayaan masyarakat (akuntabilitas) terhadap pemerintah.

Secara umum, pembangunan dapat dikatakan sebagai suatu proses perencanaan (*social plan*) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan, untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang lebih baik atau lebih sejahtera, sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu Negara. (Drajat dan Hanif, 2009).

Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata, misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. (Kuncoro, 200: 10). Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama, misalnya peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat.(Wresniwiro, 2012).

Contoh dari pembangunan fisik adalah:

- a. Prasarana perhubungan; jalan, jembatan dll.
- b. Prasaran pemasaran; gedung, pasar.
- c. Prasarana sosial; gedung sekolah, tempat ibadah, dan puskesmas.

Pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tidak terwujud namun dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini sering disebut pembangunan masyarakat, yang berupa:

- a. Pembangunan bidang keagamaan
- b. Pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana
- c. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban
- d. Pelayanan terhadap urusan masyarakat seperti pembuatan KTP, pembuatan Kartu Keluarga, pembuatan surat kelahiran
- e. Pembuatan surat keterangan domisili.

Menurut Hanafiah (1892) dalam Ali Akbar (2006) pengertian pembangunan mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-ansampai tahun 1960-an menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada kenaikan pendapatan nasional tidak bisa memecahkan masalah pembangunan. Hal initerlihat dari taraf hidup sebagian besar masyarakat tidak mengalami perbaikankendatipun target kenaikan pendapatan nasional per tahun meningkat. Dengan kata lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilahpembangunan secara sempit.

Lanjutnya Hanafiah, akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan pendapatan nasional saja.Pembangunan ekonomi itu tidak bisa diartikan sebagai kegiatan-

kegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya.

Menurut Nugroho dan Rochim Dahuri (2004) dalam Drajat dan Hanif (2009) pokok pikiran pembangunan tertuju pada cita-cita keadilan sosial. Untuk itu, pembangunan butuh proses dan tahapan yang terukur. Tahapan itu harus dapat menyentuh berbagai bidang, yakni pertama ekonomi sebagai ukuran kemakmuran materiil. Kedua adalah tahap kesejahteraan sosial.

Dalam Bab XIV UUD 1945 yang berjudul “Kesejahteraan Sosial ditegaskan bahwa sistem perekonomian berdasar atas asas kekeluargaan, dalam hal ini sumberdaya alam sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat”. Selanjutnya, apabila kemakmuran rakyat belum tercapai maka pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.

Oleh karena itu dalam aspek sosial, bukan hanya aspirasi masyarakat ikut dipertimbangkan, tapi juga keberadaan lembaga-lembaga sosial (*sosial capital*) ikut dipelihara bahkan fungsinya ditingkatkan. Sementara dalam aspek lingkungan, aspek fungsi kelestarian *natural capital* juga sangat diperhatikan demi kepentingan umat manusia. Dari semuanya itu, yang paling penting pengambilan keputusan juga berjalan sangat bersih dari berbagai perilaku lobi yang bernuansa kekurangan (*moral hazard*), yang dipenuhi kepentingan tertentu (*vested interest*) dari keuntungan semata (*rent seeking*). (Nugroho dan Rochim Dahuri, 2004 dalam Drajat dan Hanif, 2009).

Demikianlah hasil-hasil pembangunan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat adil menembus batas ruang (*interegion*) dan waktu (*inter-generation*). Implikasinya, kajian aspek spasial menjadi kurang relevan dalam keadaan empirik yang telah dilukiskan diatas. (Nugroho dan Rochim Dahuri, 2004 dalam Drajat dan Hanif, 2009).

Akan halnya kecenderungan konsep pembangunan yang dikembangkan di Indonesia, Wrihatnolo dan Dwijiwinoto (2007) mengemukakan adanya tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Strategi pertumbuhan
2. Pertumbuhan dan distribusi
3. Teknologi tepat guna
4. Kebutuhan dasar
5. Pembangunan berkelanjutan
6. Pemberdayaan

Menurut Michael dan Stephen (2011), ada tiga komponen dasar atau nilai-nilai inti yang berfungsi sebagai basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami makna pembangunan yang sesungguhnya. Ketiga nilai inti ini antara lain:

1. Kecukupan (*sustenance*)

Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Semua orang memiliki kebutuhan dasar tertentu yang harus dipenuhi untuk menjalani kehidupan. Kebutuhan dasar manusia untuk menopang kehidupan ini mencakup makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan. Jika salah

satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi atau persediaannya tidak memadai, akan terjadi suatu kondisi “keterbelakangan absolut”.

2. Harga Diri (*self-esteem*)

Menjadi manusia seutuhnya. Komponen universal kedua bagi adanya kehidupan yang baik adalah harga diri, suatu perasaan berharga dan bermartabat, tidak diperalat untuk mencapai tujuan orang lain. Semua orang maupun masyarakat berusaha memenuhi bentuk-bentuk dasar harga diri, sekalipun mereka mungkin menyebutnya otentisitas, identitas, martabat, penghargaan, kehormatan atau pengakuan.

3. Kebebasan (*freedom*) dari sikap menghamba.

Kemampuan untuk memilih. Nilai ketiga atau terakhir yang harus tercakup dalam makna pembangunan adalah konsep kebebasan manusia. Pengertian kebebasan disini perlu dipahami dalam kaitannya dengan kebebasan dari kondisi kekurangan persyaratan hidup yang bersifat material, serta kebebasan dari penghambaan sosial terhadap lingkungan, orang lain, penderitaan, lembaga yang represif, dan keyakinan dogmatis, khususnya yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah nasib yang sudah di takdirkan tuhan. Dalam kaitan ini, pembangunan juga berarti adanya kisaran pilihan yang lebih luas bagi masyarakat dan anggotanya termasuk pengurangan hambatan eksternal dalam upaya untuk mencapai tujuan itu.

Di dalam pembangunan, perempuan juga merupakan subyek yang seharusnya dilibatkan juga baik dalam proses maupun manfaatnya. Pemerintah juga berupaya meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan melalui landasan yuridis Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional yang mengamanatkan agar setiap lembaga pemerintah memastikan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam setiap tahapan kegiatan pembangunannya, baik di tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Tujuan dari PUG yang merupakan komitmen nasional maupun internasional ini adalah agar perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan dan berpartisipasi serta memiliki kontrol dan manfaat yang sama dalam pembangunan sehingga pada akhirnya dapat mengurangi ataupun mempersempit kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan (Ekawati, 2010 : 27).

Kita dapat menyimpulkan bahwa pembangunan adalah kenyataan fisik sekaligus keadaan mental (*state of mind*) dari suatu masyarakat telah melalui kombinasi tertentu dari proses sosial, ekonomi, dan lembaga memiliki cara untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Apapun komponen yang tercakup dalam kehidupan yang lebih baik itu, pembangunan di semua masyarakat setidaknya harus memiliki tiga tujuan berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang pokok seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan.
2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan lebih baik, serta perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Secara keseluruhan, hal-hal ini tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan yang bersifat materi (*materil well-being*) tetapi juga menumbuhkan harga diri individu dan bangsa.

3. Perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan tidak hanya membebaskan mereka dari kungkungan sikap menghamba dan perasaan bergantung kepada orang dan Negara-bangsa lain, tetapi juga dari berbagai faktor yang menjadi sebab kebodohan dan kesengsaraan. (Michael dan Stephen, 2011).

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir menggambarkan alur pemikiran peneliti sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca, berdasarkan judul penelitian tersebut maka kerangka berpikir dalam penelitian ini secara garisbesarnya adalah pemberdayaan perempuan begitu penting dalam pembangunan Desa.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pergeseran Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dinyatakan bahwa tujuan untuk mencapai kedudukan setara (*equal status*) perempuan sebagai peserta, pengambil keputusan, dan penikmat didalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan dinyatakan untuk memberdayakan (*empower*) perempuan dan laki-laki perlu kerjasama sebagai mitra sejajar dan saling memberi inspirasi kepada generasi kaum perempuandan laki-laki untuk bekerja sama demi kesetaraan, pembangunan berkelanjutan, dan perdamaian.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, perlu adanyapemberdayaan perempuan pedesaan melalui prinsip-prinsip pemberdayaan yaitu; (1) penyadaran, (2) pelatihan, (3) pengorganisasian, (4) pengembangan kekuatan, dan (5) membangun dinamika, serta mengetahui faktor pendukung dan

penghambat sehingga mampu mempengaruhi terciptanya program yang nyata dan berkesinambungan. Lebih lengkapnya dapat dilihat dari gambar bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini yakni bagaimana Pemberdayaan Perempuan Pedesaan dalam Pembangunan (studi kasus desa Tompotana, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar), maka fokus penelitian ini mendiskripsikan dan menganalisa pemberdayaan perempuan di desa

Topotana melalui prinsip pemberdayaan Masyarakat yaitu; (1) kesadaran, (2) pelatihan, (3) pengorganisasian, (4) pengembangan kekuatan, dan (5) membangun dinamika, serta faktor pendukung dan penghambat. Hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah terciptanya program pemberdayaan perempuan yang teratur, nyata dan berkesinambungan.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka peneliti mendeskripsikan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di desa Tompotana, Kecamatan Mappakasunggu adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip atau langkah-langkah memandirikan perempuan desa Tompotana dalam bidang non-fisik untuk meningkatkan pendapatan keluarga maupun desa Tompotana secara umum.

2. Kesadaran

Kesadaran adalah langkah atau prinsip pertama yang dilakukan oleh perempuan desa Tompotana untuk meningkatkan pendapatan pada perempuan dengan menyadari bahwa mereka memiliki peluang-peluang dan memanfaatkannya.

3. Pelatihan

Pelatihan adalah langkah selanjutnya yang dilakukan dalam memandirikan perempuan desa Tompotana untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada dalam diri perempuan serta meningkatkan keterampilan perempuan seperti pelatihan menjahit dan pengolahan makanan dari hasil tangkapan nelayan.

4. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah desa Tompotana dalam memberdayakan perempuan desa Tompotana dengan mengelompokkan perempuan-perempuan yang akan diberdayakan, sehingga hal yang akan dikerjakan lebih teratur dan terarah dengan baik.

5. Pengembangan Kekuatan

Pengembangan Kekuatan adalah langkah atau prinsip selanjutnya yang dilakukan mengembangkan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Bila masyarakat mempunyai kekuatan, setengah perjuangan untuk pembangunan sudah dimenangkan. Tetapi perlu ditekankan kekuatan itu benar-benar dari masyarakat bukan dari satu atau dua orang pemimpin saja. Kekuatan harus mengontrol kekuasaan para pemimpin.

6. Membangun Dinamika

Berarti bahwa masyarakat itu sendiri yang memutuskan dan melaksanakan program-programnya sesuai dengan rencana yang sudah digariskan dan diputuskan sendiri.

7. Faktor pendukung, yaitu hal-hal yang dapat mendukung terlaksananya prinsip-prinsip dalam pemberdayaan perempuan.

8. Faktor penghambat, yaitu hal-hal yang dapat menghambat terlaksananya prinsip-prinsip dalam pemberdayaan perempuan.

9. Terciptanya program pemberdayaan perempuan yang nyata dan berkesinambungan adalah hasil yang ingin dicapai dengan adanya pemberdayaan perempuan pedesaan dalam pembangunan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan pada bulan yang disesuaikan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tompotana, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar. Alasan penulis sehingga pemberdayaan perempuan pedesaan dalam pembangunan dijadikan sebagai judul penelitian dengan pertimbangan bahwa masih sangat kurangnya kegiatan pemberdayaan bagi perempuan oleh pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah Desa Tompotana.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat alamiah, melalui proses yang telah ditetapkan.

1. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata data dan gambar, kata-kata di susun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan. Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono: 2014).

2. Tipe penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpulkan dari lapangan secara objektif.

C. Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil observasi yang di peroleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.
2. Data Sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literature dan dokumen serta data yang diambil dari bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

D. Informan Penelitian

Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian ini yaitu dengan jalan peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan orang yang menjadi sumber data dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

Maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap terlibat dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Desa Tompotana, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar. Dalam hal ini dapat ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Daftar Informan

No.	Nama	Inisial	Instansi	Jabatan	Ket.
1.	Abdul Azis	AA	Kantor Desa	Kepala Desa	1
2.	Agus	A	Kantor Desa	Sekretaris Desa	1
3.	Awal	A	Kantor Desa	Bendahara Desa	1
4.	Rosmina Hajar	RH	PKK	Anggota	1
5.	Arif Lau	AL	LPM	Ketua	1
6.	Nurhayati Jinne	NJ	-	Tokoh Perempuan	2
7.	Leo'	L	-	Tokoh Masyarakat	1
Jumlah					8

Berdasarkan tabel data informan di atas penulis memasukkan sebanyak 8 informan dengan rincian, 3 orang dari perangkat desa, orang dari anggota PKK, ketua LPM, 2 orang dari Tokoh Perempuan, dan 1 orang masyarakat. Penulis menganggap jumlah tersebut sudah mampu memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012: 308) teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu;

1. Observasi yakni pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti yang terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan di Desa Tompotana, Kecamatan Mappakasungu, Kabupaten Takalar.

2. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Proses penelitian diperlukan adanya persiapan wawancara. Persiapan wawancara tak terstruktur dapat diselenggarakan menurut tahapan-tahapan tertentu yakni sebagai berikut. Tahap, ialah menemukan siapa yang akan diwawancarai. Barangkali pada suatu saat pilihan hanya berkisar di antara beberapa orang memenuhi persyaratan. Tahap kedua, ialah mencari tahu bagaimana cara yang sebaiknya untuk mengadakan kontak dengan informan . karena informan adalah orang-orang pilihan, dianjurkan agar jangan membiarkan orang ketiga menghubungi, tetapi peneliti sendirilah yang melakukannya. Tahap ketiga, mengadakan persiapan yang matang untuk melakukan wawancara.

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2010 : 201) bahwa dokumentasi dari kata “dokumen” yang artinya barang-barang tertulis. Dekumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, literatur dan sebenarnya.

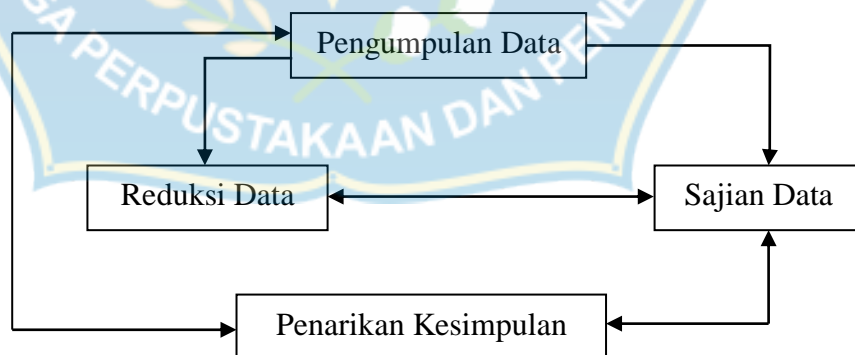
F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, pencatatan lapangan, kategori menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan maupun kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Guna menjawab permasalahan penelitian, maka Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa informan kunci yang ditabulasikan dan dipresentasikan sesuai dengan hasil temuan (observasi) dan wawancara mendalam penulis dengan para informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (display data) dan kemudian disajikan dalam bentuk konten analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

Gambar 3.1

Model Analisis Interaktif (Sugiyono: 2012)



G. Keabsahan Data

Validitas data sangat mendukung hasil akhir penelitian, oleh Karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa pegabsahan data. Pengabsahan data dalam

penelitian ini diperiksa dengan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

Menurut William dalam Sugiyono (2012), triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan bermacam cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber yaitu dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
2. Triangulasi metode yaitu bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan dan ketidak akuratan.
3. Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengumpulan data peneliti melakukan wawancara dengan informan dalam kondisi waktu yang berbeda untuk menentukan kredibilitas data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Tompotana

Desa Tompotana merupakan desa yang dimekarkan pada tahun 2011, pecahan pemekaran dari desa Maccini Baji yang terletak di Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa yang berada di kepulauan Tanakeke ini dibentuk pada tanggal 22 Desember 2011.

Dengan adanya pemekaran tersebut, penyebaran wilayah atau dusun semakin bertambah. Yang terdiri dari 3 dusun yakni dusun Tompotana, dusun Ujungtanah, dan dusun Cambaya. Pada aal pemekaran desa Tompotana yang dipimpin oleh pejabat sementara Kepala Desa yang diutus langsung oleh Camat Mappakasunggu dan Bupati Takalar yang bernama bapak Safiuddin (Staf Pemerintahan Camat Mappakasunggu) menjabat selama 4 bulan.

Kepala Desa pertama yang terpilih pada Pilkades 2011 adalah Tajuddin Erang biground salah satu tokoh masyarakat Tompotana yang mendapatkan suara sebanyak 338 suara.

Sepanjang sejarah pemerintahan desa Tompotana, tongkat estafet kepemimpinan di desa Tompotana sejak dibentuk pada tahun 2011 telah mengalami beberapa kali pergantian Kepala Desa dengan periode masing masing sebagai berikut:

Tabel 4.1

Daftar Kepala Desa yang Menjabat

No.	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	2011	Safiuddin	Pelaksana Tugas
2	2011 - 2016	Tajudding Erang	Periode Pertama
3	2016 - 2017	Rustam Sila	Pelaksana Tugas
4	2018	Abdul Azis	Pelaksana Tugas
5	2019 (Sekarang)	Supriadi Siantang	Pelaksana Tugas

Sumber Data: Diolah

B. Keadaan Demografi

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Desa Tompotana, Kecamatan Mappakasunggu merupakan salah satu desa yang terletak di kepulauan Tanakeke. Jarak dari pusat pemerintahan desa ke daratan (dermaga Takalar Kota Lama) kurang lebih 11 mil. Dengan jarak tempuh kurang lebih 60 menit dengan menggunakan perahu Jolloro (Kapal sedang). Sedangkan untuk menempuh desa tetangga dapat menggunakan perahu kecil dengan jarak tempuh yang bervariasi dalam waktu 3 sampai 15 menit.

- Sebelah Utara : Laut Selat Makassar.
- Sebelah Selatan : Desa Tompotana
- Sebelah Timur : Desa Maccini Baji.
- Sebelah Barat : Desa Rewatayya.

Desa Tompotana merupakan salah satu desa di kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki luas

5,1 km dengan potensi alam dari hasil laut yang sangat produktif seperti budidaya rumput laut, tambak ikan, udang dan hutan mangrove.

Secara administrasi, Pemerintah Desa Tompotana Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar terdiri dari 3 (Tiga) dusun, yaitu Dusun Tompotana, Dusun Ujung Tanah, dan Dusun Cambaya.

a) Keadaan Topografi

Secara topografi, desa Tompotana merupakan daerah kepulauan (laut dan dataran rendah) yang terdiri dari beberapa dusun, ada beberapa diantaranya merupakan dataran tanah dan sebagian lainnya adalah dataran buatan masyarakat (area mangrove yang dikonversi/ditimbun menjadi daratan untuk pemukiman. Dan berdasarkan ketinggian wilayah, Desa Tompotana diklasifikasikan sebagai dataran rendah (0 – 100 m dpl).

b) Iklim dan Curah Hujan

Desa Tompotana memiliki iklim tropis dua musim, yaitu: musim hujan dan musim kemarau. pada musim hujan semua lahan rumput laut akan ditanami rumput laut jenis cottoni. Sementara untuk musim kemarau, areal rumput laut jenis cottoni dan spinisiun (SP). Berdasarkan hidrologi dan tata air, desa Tompotana tidak memiliki sumber air tawar. Untuk memperoleh air tawar, desa Tompotana harus mengangkut dari desa tetangga (Maccini Baji), daratan Takalar, dan air hujan pada saat musim hujan.

c) Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan desa Tompotana dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Penggunaan Lahan Desa Tompotana Tahun 2016

No.	Penggunaan Lahan	Satuan	Jumlah
Lahan Sawah			
1.	Irigasi Setengah Teknis	Ha	1
2.	Irigasi Non PU	Ha	1
3.	Tadah Hujan	Ha	10.4
Lahan Bukan Sawah			
1 ^D	Pekarangan/Bangunan	Ha	0
2.	Tegal/Kebun	Ha	-
3.	Sementara Tidak Diusahakan	Ha	20
4.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	Ha	22
5.	Hutan Negara	Ha	0
6.	Perkebunan	Ha	1
7.	Lahan Lainnya	ha	-

Sumber Data: RKPD Tompotana 2017

Tabel 4.3
Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan

No.	Komoditas	Produksi Tahun Terakhir	
		Satuan	Jumlah
1.	Peternakan	Ekor	
	Sapi		0
	Kambing		110
	Ayam		50
2.	Perikanan	Ton/Tahun	
	Keramba		0.8
	Ikan		7.8
	Rumput Laut		2.6
	Udang		0.4

ari kondisi alam desa Tompotana diatas, dapat diidentifikasi sumber daya alam yang dimiliki merupakan salah satu potensi pembangunan di desa

Topotana. Hasil identifikasi sumber daya alam desa Tompotana, Kecamatan Mappakasunggu dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Sumber Daya Alam Desa Tompotana Tahun 2016

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Jumlah
1.	Material Batu Kapur	M ³	100
2.	Pasir Urug	M ³	233
3.	Lahan Hutan	Ha	2
4.	Tanaman Perkebunan : Kacang Tanah, Kelapa, dll.	Ha	0

Sumber data: RKPD Tompotana Tahun 2017

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk desa Tompotana berdasarkan profil Desa Tompotana tahun 2016 sebanyak 1.068 jiwa yang terdiri dari 551 laki-laki dan 517 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk adalah tangkap ikan (Nelayan). Data Sumber daya Manusia dapat dilihat dari Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Sumber Daya Manusia Tahun 2016

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Jumlah
1.	Penduduk dan Keluarga		
	a. Penduduk Laki-laki	Orang	551
	b. Penduduk Perempuan	Orang	517
	c. Jumlah Keluarga	Keluarga	482
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Perikanan, Perkebunan	Orang	
	b. Industri pengolahan, (kerajinan, dll)	Orang	
	c. Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	Orang	
	d. Jasa	Orang	
3.	Pekerjaan atau Mata Pencaharian		
	a. Karyawan	Orang	-
	b. TNI/Polri	Orang	-

	c. Swasta	Orang	-
	d. Wiraswasta/Pedagang	Orang	24
	e. Petani	Orang	36
	f. Tukang	Orang	17
	g. Buruh Tani	Orang	22
	h. Pensiunan	Orang	2
	i. Nelayan	Orang	431
	j. Peternak	Orang	6
	k. Jasa	Orang	42
	l. Pengrajin	Orang	12
	m. Pekerja Seni	Orang	6
	n. Lainnya	Orang	42
	o. Tidak Bekerja/Pengangguran	Orang	133
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat		
	a. Lulusan Pendidikan Umum		
	1) Taman Kanak-kanak	Orang	-
	2) SD/Sederajat	Orang	47
	3) SMP/Sederajat	Orang	26
	4) SMA/Sederajat	Orang	17
	5) Akademik (D1-D3)	Orang	5
	6) Sarjana (S1)	Orang	26
	7) Pasca Sarjana (S2)	Orang	
	b. Lulusan Pendidikan Khusus		
	1) Pondok Pesantren	Orang	
	2) Pendidikan Keagamaan	Orang	
	3) Sekolah Luar Biasa	Orang	
	4) Kursus Keterampilan	Orang	
	c. Tidak Lulus dan Tidak Sekolah		
	1) Tidak Lulus	Orang	
	2) Tidak Sekolah	Orang	
5.	Jumlah Penduduk Miskin (berdasarkan standar BPS)	Orang	231

Sumber Data: RKPD Tompotana Tahun 2017

c. Sumber Daya Pembangunan (Infrastruktur)

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Tompotana yang merupakan potensi bagi pembangunan desa Tompotana dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6
Sumber Daya Pembangunan Desa Tompotana Tahun 2016

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1.	Kantor Desa	1	Permanen
2.	Prasarana Umum		
	a. Jalan	3.8	Km
	b. Jembatan	3	Buah
	c. Olahraga		Buah
	d. Gedung Kesenian/Budaya		Buah
	e. Balai Pertemuan		Buah
	f. Sumur Desa	1	buah
3.	Prasarana Pendidikan		
	a. Perpustakaan	-	Buah
	b. Gedung Sekolah PAUD	1	Buah
	c. Taman Pendidikan Al-Qur'an	1	Buah
	d. Gedung SD/Sederajat	1	Buah
	e. Gedung SMP/Sederajat	1	Buah
	f. Gedung SMA/Sederajat	-	Buah
	g. Gedung Perguruan Tinggi	-	Buah
4.	Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas	-	Buah
	b. Puskesmasdes	-	Buah
	c. Posyandu	1	Buah
	d. Polindes	-	Buah
	e. MCK	3	Buah
	f. Sarana Air Bersih	110	Buah
5.	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa	-	Buah
	b. Kios Desa	10	Buah
No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
6.	Prasarana Ibadah		
	a. Masjid	2	Buah
	b. Musholla	-	Buah
	c. Gereja	-	Buah
	d. Pura	-	Buah
	e. Vihara	-	Buah
	f. Klenteng	-	Buah

Sumber Data: RKPD Tompotana 2017

d. Sumber Daya Sosial Budaya

Sosial budaya adalah salah satu komponen yang tidak bisa dilepaskan dari suatu daerah. Sumber Daya Sosial Budaya Desa Tompotana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7
Daftar Sumber Daya Sosial Desa Tompotana

No.	Uraian Sumber Daya Sosial	Satuan	Jumlah
1.	Kelembagaan		
	a. LPM		
	1) Jumlah Pengurus	Orang	5
	2) Jumlah Anggota	Orang	12
	b. Lembaga Adat	Lembaga	1
	c. TP PKK		
	1) Jumlah Pengurus	Orang	3
	2) Jumlah Anggota	Orang	12
	d. BUMDes		
	1) Jumlah BUMDes	Buah	1
	2) Jenis BUMDes	Buah	2
	e. Karang Taruna		
	1) Jenis Kegiatan	Buah	-
	2) Jumlah Pengurus	Orang	-
	3) Jumlah Anggota	Orang	-
	f. Dusun		
	1) Jumlah Dusun	Buah	3
	g. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya	Buah	2
No.	Uraian Sumber Daya Sosial	Satuan	Jumlah
2.	Trantib dan Bencana		
	a. Jumlah Anggota Linmas	Orang	3
	b. Jumlah pos Kamling	Buah	-
	c. Jumlah Operasi Penertiban	Kali	-
	d. Jumlah Kejadian Kriminal	Kali	-
	1) Pencurian	Kali	-
	2) Perkosaan	Kali	-
	3) Kenalakan Remaja	Kali	-
	4) Pembunuhan	Kali	-
	5) Perampokan	Kali	-

	6) Penipuan	Kali	-
	e. Jumlah Kejadian Bencana	Kali	1
	f. Jumlah Pos Bencana Alam	Pos	-
	g. Jumlah Pos Hutan Lindung	Pos	-
3	Seni Budaya		
	a. Jumlah Grup Kesenian	Buah	1
	b. Jumlah gelar Seni Budaya Pertahun	Kali	2

Sumber Data: RKPD Tompotana 2017

Pemerintah desa Tompotana merupakan unsur pelaksana dalam pemerintahan, dimana desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

a. Visi dan Misi

Visi

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan desa yang ingin dicapai dalam 6 tahun mendatang, visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan desa yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arahan pembangunan jangka menengah Kabupaten Takalar.

Dengan mempertimbangkan keadaan desa, permasalahan pembangunan dan mengacu pada visi yang telah disampaikan oleh Kepala Desa Tompotana hasil pemilihan kepala desa tahun 2011 maka visi desa Tompotana tahun 2011-2016 adalah:

“Terwujudnya Desa Tompotana yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat.”

Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan desa Tompotana selama tahun 2016-2022 dengan penjelasan makna visi sebagai berikut:

Maju

“Berarti kehidupan masyarakat lebih baik dalam aspek ekonomi sosial “

Mandiri

“Berarti mampu membangun desa dengan menggali pendayagunaan potensi desa Tompotana “

Sejahtera

“Berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat desa”

Bermartabat

“Berarti penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik adil dan demokratis”

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi masyarakat yang ada di desa Tompotana yang akan menjadi pedoman untuk 6 tahun kedepan misi yang telah dirumuskan ini merupakan dasar dalam menyusun program dan kegiatan-kegiatan yang akan mendukung pencapaian tujuan dari visi desa. Adapun misi yang telah dirumuskan yaitu:

- a) Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik
 - b) Meningkatkan SDM dan SDA untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
 - c) Mengupayakan menciptakan desa aman dan menyamankan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat bermasyarakat
 - d) Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi kesehatan pendidikan agama dan wisata budaya olahraga sesuai dengan kebutuhan wilayah Dusun masing-masing
- b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tompotana

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu susunan yang merinci pembagian aktivitas kerja dan bagaimana berbagai tingkat aktivitas saling berhubungan satu sama lain dalam suatu perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi, maka batasan-batasan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam perusahaan dapat menjadi jelas. Sehingga dapat berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing serta memudahkan mengendalikan organisasi perusahaan. Oleh karena itu, struktur organisasi harus dibuat sebaik mungkin agar memudahkan pegawai atau karyawan lebih mudah mengetahui bagiannya. Adapun struktur organisasi Desa dapat dilihat dari bagan berikut.





c. Jumlah Perangkat Desa Tompotana

I. Jumlah perangkat desa: 12 orang

II. Menurut Jabatan

- Kepala Desa : 1 Orang
- Sekretaris Desa : 1 Orang
- Kaur Keuangan : 1 Orang
- Kaur Tata Usaha dan Umum : 1 Orang
- Kaur Perencanaan : 1 Orang
- Kasi Pemerintahan : 1 Orang
- Kasi Kesejahteraan : 1 Orang
- Kasi Pelayanan : 1 Orang

- Staf TU dan Urusan Umum : 1 Orang
- Kepala Dusun : 3 Orang

III. Menurut Jenis Kelamin

- Laki-laki : 10 orang
- Perempuan : 2 orang

IV. Menurut Agama

- Islam : 12 Orang
- Kristen :-
- Hindu :-
- Buddha :-
- Konghucu :-

V. Menurut Pendidikan Umum

- Pascasarjana / S2 : 1 Orang
- Sarjana / S1 : 5 Orang
- D2 : 2 Orang
- SMU / SLTA : 1 Orang
- SMP / SLTP : 1 Orang
- SD : 2 Orang

C. Pemberdayaan Perempuan desa Tompotana dalam Pembangunan sehingga Terciptanya Program Pemberdayaan Perempuan yang Teratur, Nyata, dan Berkesinambungan.

Diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya menjadi dasar bagi upaya pemberdayaan perempuan. Tidak dapat dipungkiri, pemiskinan terhadap perempuan oleh ideologi gender patriarki memposisikan perempuan

sebagai anggota masyarakat yang tidak beruntung dan kerap mengalami ketidakadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka ide utama pemberdayaan perempuan bermula dari konsep pengarusutamaan gender, kesetaraan gender, dan keadilan.

Perempuan memiliki peran yang penting dalam pembangunan nasional. Salah satu upaya untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan nasional adalah dengan pemberdayaan. Pada pendekatan pemberdayaan ini, diasumsikan bahwa jika ingin memperbaiki posisi tawar perempuan, maka dibutuhkan suatu upaya untuk meningkatkan kekuasaannya untuk tawar menawar dan untuk merubah sendiri nasibnya. Artinya, pendekatan ini menghendaki pelibatan kaum perempuan tidak saja sebagai objek tetapi juga sebagai subjek/pelaku aktif, sebagai orang yang merumuskan sendiri apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Beberapa ahli studi perempuan menyatakan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan posisi *bargaining* perempuan adalah melalui pengorganisasian, yang dianggap sebagai langkah yang konkrit untuk memberdayakan perempuan itu secara lebih baik.

Hal itu termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah pada dasarnya mengandung prinsip persamaan hak dan kewajiban bagi laki-laki maupun perempuan tanpa adanya perbedaan dalam segala bidang. Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pergeseran Konvensi Penghapusan

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dinyatakan bahwa tujuan untuk mencapai kedudukan setara (equal status) perempuan sebagai peserta, pengambil keputusan dan penikmat didalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan dinyatakan untuk memberdayakan (empower) perempuan dan laki-laki perlu kerjasama sebagai mitra sejajar dan memberi inspirasi kepada generasi baru kaum perempuan dan laki-laki untuk bekerja sama demi kesetaraan, pembangunan berkelanjutan dan perdamaian.

Dalam peningkatan pemberdayaan perempuan, penulis menjabarkan prinsip-prinsip pemberdayaan yang perlu dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun perempuan itu sendiri. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

10. Penyadaran

Berarti masyarakat secara keseluruhan menjadi sadar bahwa mereka mempunyai tujuan-tujuan dan masalah-masalah. Masyarakat mulai sadar menemukan peluang-peluang dan memanfaatkannya, menemukan sumberdaya-sumberdaya yang ada di tempat itu yang mungkin sampai saat ini tak pernah dipikirkan orang.

Dalam penerapannya, hal tersebut diperjelas oleh pernyataan AA selaku Kepala Desa Tompotana.

"Prinsip penyadaran itu pasti kami terapkan, baik kami sampaikan secara lisan maupun melalui berbagai hal seperti pengembangan kegiatan PKK, membuat program prioritas untuk perempuan, melaksanakan pelatihan-pelatihan khusus perempuan, dan selalu melibatkan lembaga PKK dalam setiap kegiatan." (Hasil Wawancara oleh AA 18 Januari 2019, pukul 10.37 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tompotana, maka dapat dianalisis bahwa kesadaran terhadap pentingnya pemberdayaan perempuan di desa Tompotana memang diterapkan, hal itu ditandai dengan adanya pengembangan kegiatan PKK serta pembuatan program prioritas bagi perempuan desa Tompotana seperti pelatihan menjahit khusus perempuan desa Tompotana serta selalu melibatkan lembaga PKK dalam setiap kegiatan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kaur Keuangan desa Tompotana yang berinisial AN:

"dalam penerapannya, pemerintah desa melibatkan langsung perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, serta meningkatkan dan mengkomodifikasi anggaran kegiatan PKK. Adanya bantuan mesin jahit kepada perempuan yang terlebih dahulu telah mengikuti pelatihan, saya rasa mampu memberi kesadaran bagi perempuan agar mampu memberdayakan dirinya dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperolehnya di pelatihan." (Hasil Wawancara oleh AN, 18 Januari 2019, pukul 11.00 WITA).

Pernyataan AN diatas membuktikan bahwa pemerintah desa Tompotana sangat memperhatikan pemberdayaan masyarakat khususnya bagi kaum perempuan dengan melibatkan mereka dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Bukan hanya itu, pemerintah desa Tompotana juga meningkatkan dan mengkomodifikasi anggaran kegiatan lembaga PKK desa Tompotana. Dan pernyataan AN diatas juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menerapkan prinsip kesadaran bagi masyarakat, khususnya bagi pemberdayaan perempuan dengan memberikan bantuan berupa mesin jahit kepada perempuan yang sebelumnya telah dibekali ilmu tentang menjahit melalui pelatihan yang dilaksanakan pemerintah, sehingga perempuan

juga termotivasi dan mampu mengasah potensi-potensi lain yang ada dalam dirinya.

Sedangkan upaya perempuan desa Tompotana sendiri dalam memberdayakan dirinya telah dijelaskan oleh salah satu Tokoh Perempuan desa Tompotana yang berinisial NJ.

"kami mencari informasi kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan di desa, terutama kegiatan bagi peningkatan ekonomi maupun sosial budaya." (hasil wawancara dengan NJ, 23 Desember 2018, pukul 18.36 WITA).

Dari pernyataan NJ diatas menunjukkan bahwa upaya perempuan desa Tompotana hanya sebatas mencari informasi tentang kegiatan pemberdayaan perempuan yang akan dilaksanakan pemerintah desa Tompotana, dimana perempuan lebih menekankan pada bidang ekonomi dan sosial budaya.

Maka dapat dianalisis bahwa sebagian besar perempuan desa Tompotana kurang maksimal dalam memberdayakan dirinya sendiri, mereka masih saja mengandalkan pemerintah dalam

11. Pelatihan

Belajar untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan bertani, kerumahaan, industri dan keterampilan-keterampilan lainnya. Perempuan dilatih untuk menemukan potensi-potensi yang ada dalam dirinya hingga mampu berdaya, tak hanya bergantung pada orang lain.

Berkaitan dengan hal diatas, bentuk pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah desa Tompotana telah dijelaskan oleh Kasi Kesejahteraan Desa Tompotana yang berinisial RN.

"dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat desa, maka pemerintah desa melakukan suatu kegiatan pelatihan untuk memberdayakan masyarakat, khususnya bagi pemberdayaan perempuan, ada beberapa bentuk kegiatan yang telah kami laksanakan seperti mengolah hasil tangkapan nelayan berupa ikan

dan cumi-cumi menjadi makanan ringan, hal itu dilakukan atas kerja sama dengan lembaga PKK dan Oxfam sebagai lembaga swasta, itu berlangsung sejak tahun 2012-2015. Sedangkan untuk tahun 2016-2018, bentuk kegiatan pemberdayaan perempuan yaitu melalui kursus menjahit pada bulan Agustus kemarin, atas kerjasama dengan lembaga PKK dan masyarakat." (hasil wawancara dengan RN, 19 Januari 2019, pukul 14.00 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara dengan RN diatas menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan pelatihan bagi peningkatan taraf perekonomian masyarakat terkhusus perempuan desa Tompotana dengan mengolah hasil tangkapan nelayan menjadi makanan, namun jangka waktunya tidak berlangsung lama. Pendapatan yang diperoleh pun hanya pada masa lembaga swasta Oxfam Kemudian pemerintah desa mengadakan kursus menjahit.

Hal tersebut juga diperjelas oleh salah satu tokoh perempuan desa Tompotana yang berinisial N.

"dalam pelaksanaan pelatihan, perempuan sangat senang sekali menyambungnya, terlihat dari antusiasnya menghadiri rapat-rapat atau pertemuan yang diadakan oleh pemerintah desa ketika hal itu berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Perempuan juga terlibat langsung dalam pelaksanaan pelatihan seperti pengolahan bahan makanan maupun kursus menjahit di kantor desa." (hasil wawancara oleh N, 19 Januari 2019. Pukul 09.00 WITA).

Sedangkan dilihat dari pengaruh pelatihan, SS yang merupakan salah satu masyarakat desa Tompotana menjelaskan bahwa.

"pelatihan masih kurang berpengaruh bagi peningkatan keterampilan perempuan desa Tompotana, terlebih masi sangat kurang yang mengaplikasikan ilmu yang didapat dari pelatihan tersebut sehingga tidak ada dampak yang terlihat jelas bagi peningkatan perekonomian bagi perempuan." (hasil wawancara oleh SS, 19 Januari 2019, pukul 09.30 WITA).

Berdasarkan penjelasan N menunjukkan bahwa perempuan desa Tompotana sangat antusias dalam mengikuti dalam mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah desa Tompotana sehingga keterlibatan perempuan

dapat dilihat dari keikutsertaannya menjadi peserta kursus menjahit di kantor desa Tompotana. Meskipun demikian, penjelsan SS menunjukkan bahwa pengaruh pelatihan bagi perempuan desa Tompotana masih sangat kurang, hal tersebut menunjukkan kurang efektifnya kegiatan pelatihan yang dilaksanakan hingga keterampilan yang diperoleh tidak diaplikasikan secara maksimal dan tidak terjadi peningkatan ekonomi masyarakat khususnya bagi perempuan desa Tompotana.

Selanjutnya hasil wawancara ditambahkan oleh NJ selaku Tokoh Perempuan Desa Tompotana:

“Untuk saat ini pemerintah desa fokus pada pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, tetapi kalau saat ini perempuan hanya terlibat di dua bidang pertama dibidang pembinaan masyarakat misalnya pembinaan PKK, mejadi kader posyandu, dan pembinaan kelompok tani perempuan dan lain-lain, sedangkan di pemberdayaan masyarakat ada pelatihan kelompok perempuan seperti pelatihan kursus menjahit.” (hasil Wawancara dengan NJ, 23 Desember 2018, pukul 18.47 WITA)

Berdasarkan hasil wawancara dengan R diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan bagi pemberdayaan perempuan tidak serta merta berjalan lancar, namun ada penghambat yang harus dihadapi oleh pemerintah maupun lembaga desa Tompotana agar kegiatan pelatihan tetap berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Kemudian hasil wawancara dengan NJ menunjukkan bahwa perempuan desa Tompotana hanya aktif dalam bidang pemberdayaan dan sangat antusias dalam berpartisipasi di dalamnya.

12. Pengorganisasian

Berarti bahwa segala hal yang dikerjakan secara teratur, ada pembagian tugas diantara individu-individu yang akan bertanggungjawab terhadap

pelaksanaan tugas masing-masing dan ada kepemimpinan yang tidak hanya terdiri dari beberapa gelintir orang tapi kepemimpinan diberbagai tingkatan.

Dalam pembentukan kelompok pemberdayaan perempuan desa Tompotana, AN selaku Kaur Keuangan menjelaskan peran lembaga desa.

"peran lembaga desa dalam pembentukan kelompok pemberdayaan masih sangat minim, baik itu lembaga PKK itu sendiri maupun lembaga pemberdayaan masyarakat desa Tompotana. Partisipasi lembaga-lembaga desa masih butuh ditingkatkan lagi." (hasil wawancara oleh AN, 18 Januari 2019, pukul. 11.07 WITA).

AN juga menjelaskan mengenai peran masyarakat desa tompotana dalam mengawal program pemberdayaan perempuan, baik saat kegiatan berlangsung maupun setelah kegiatan.

"masyarakat tentunya berperan penting dalam mengawal program pemberdayaan perempuan, dimana ketika pemerintah menyampaikan informasi akan dilaksanakan kegiatan seperti pelatihan, maka masyarakat ikut terlibat dalam musyawarah sebelum pelaksanaan, kemudian masyarakat menyampaikan informasi tersebut kepada perempuan desa Tompotana, masyarakat juga hadir di tempat kegiatan saat sedang berlangsung dan memantau kegiatan tersebut." (hasil wawancara oleh AN, 18 Januari 2019, pukul 11.10 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara dengan AN, menunjukkan adanya peran dari lembaga desa Tompotana maupun masyarakat dalam pembentukan kelompok dan pengawalan program pemberdayaan perempuan desa Tompotana. Meskipun peran lembaga pemerintah desa seperti PKK dan LPM masih sangat minim, sehingga berjalannya kegiatan dibawah tanggung jawab kepala desa dan staf-staf desa Tompotana.

13. Pengembangan Kekuatan

Kekuasaan berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Bila masyarakat mempunyai kekuatan, setengah perjuangan untuk pembangunan sudah dimenangkan. Tetapi perlu ditekankan kekuatan itu benar-benar dari

masyarakat bukan dari satu atau dua orang pemimpin saja. Kekuatan harus mengontrol kekuasaan para pemimpin.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Desa Tompotana yang berinisial AA menjelaskan upaya yang telah ditempuh pemerintah desa.

"dalam mengembangkan kekuatan atau potensi yang dimiliki perempuan, kami selaku pemerintah desa menumbuhkan kepercayaan diri perempuan dalam setiap kegiatan di desa serta membuat ruang khusus dalam pengambilan keputusan perencanaan desa." (hasil wawancara oleh AA, 18 Januari 2019, pukul 10.45 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tompotana, menunjukkan adanya upaya yang betul-betul dilakukan oleh pemerintah desa Tompotana dalam mengembangkan kekuatan atau potensi yang ada dalam diri perempuan desa Tompotana. Terlebih adanya pernyataan bahwa perempuan dibuatkan ruang khusus dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan desa. Hal tersebut dapat dianalisis bahwa

Sedangkan mengenai tanggapan masyarakat terhadap adanya upaya pengembangan kekuatan atau potensi perempuan, salah satu tokoh masyarakat yang berinisial ML menyatakan.

"masyarakat sangat mengapresiasi upaya-upaya yang berdampak pada kebaikan desa Tompotana, baik peningkatan ekonomi desa, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, termasuk dalam pengembangan potensi dari perempuan desa Tompotana." (hasil wawancara oleh ML, pukul 13.48 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ML, menunjukkan bahwa adanya tanggapan yang sangat positif dari masyarakat atas setiap kegiatan yang berdampak pada peningkatan mutu di desa Tompotana, termasuk juga kegiatan-kegiatan bagi perempuan desa Tompotana. Sehingga dapat dianalisis bahwa masyarakat sudah cerdas dalam menanggapi kegiatan kegiatan yang

dilaksanakan di desa, baik itu kegiatan kelompok pemberdayaan perempuan maupun kegiatan umum lainnya.

14. Membangun Dinamika

Bahwa masyarakat atau perempuan itu sendiri yang memutuskan dan melaksanakan program-programnya sesuai dengan rencana yang sudah digariskan dan diputuskan sendiri. Artinya, ada pergerakan dalam kelompok pemberdayaan perempuan yang telah dibentuk.

Sementara itu, upaya pemerintah desa dalam membangun dinamika tersebut, serta peran pemerintah desa dan masyarakat dalam mengawal pengambilan keputusan kelompok pemberdayaan perempuan, telah dijelaskan oleh sekretaris desa Tompotana yang berinisial A.

"pemerintah terus mendorong kelompok pemberdayaan perempuan dalam menjalankan program-program yang telah dibuatnya baik itu bagi peningkatan ekonomi maupun sosial-budaya. Kemudian peran pemerintah bersama masyarakat desa Tompotana memisahkan kepentingan perempuan dan kaum laki-laki serta memprioritaskan urusan kegiatan perempuan" (hasil wawancara oleh A, 25 Januari 2019, pukul 14.00 WITA).

Hasil wawancara dengan AB diatas menunjukkan adanya upaya, peran pemerintah serta masyarakat desa Tompotana dalam membangun dinamika dalam kelompok pemberdayaan perempuan desa Tompotana dengan mendorong atau terus memotivasi kelompok pemberdayaan perempuan hingga terjadi peningkatan ekonomi masyarakat khususnya peningkatan ekonomi perempuan desa Tompotana. Adapun peran pemerintah dan masyarakat desa Tompotana, memisahkan kepentingan perempuan dan kaum laki-laki serta memprioritaskan urusan kegiatan perempuan.

Hal diatas dapat dianalisis bahwa pemerintah sangat berperan penting dalam setiap arus kegiatan kelompok pemberdayaan perempuan, hal itu terlihat

dari adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Tompotana dalam membangun dinamika kelompok pemberdayaan perempuan serta selalu mendorong dan memberikan motivasi bagi kelompok pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, peran pemerintah desa Tompotana sudah maksimal dalam pemberdayaan perempuan desa Tompotana.

Adapun pengaruh kepemimpinan dalam kelompok pemberdayaan perempuan telah dijelaskan oleh NJ selaku Tokoh perempuan desa Tompotana.

"keberadaan seorang pemimpin dalam kelompok pemberdayaan perempuan sangat penting, sangat berpengaruh bagi keberlangsungan kelompok pemberdayaan perempuan, karena adanya pemimpin maka program-program yang akan dilaksanakan oleh kelompok pemberdayaan perempuan nantinya akan lebih terarah dan teratur. Seperti misalkan dalam pelatihan, ada satu orang yang dipercayakan untuk mengatur entah itu anggota-anggotanya maupun jadwal yang harus tepat waktu." (hasil wawancara oleh NJ, 23 Desember 2018, pukul 18.45 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara dengan NJ di atas menunjukkan adanya pengaruh kepemimpinan dalam sebuah kelompok pemberdayaan perempuan desa Tompotana baik dalam pengarahan, pengaturan, dan lain sebagainya. Dapat dianalisis bahwa pengaruh kepemimpinan dalam kelompok masih kurang maksimal dengan seringnya mengulur waktu saat pelaksanaan pelatihan, keterlambatan anggota pelatihan serta adanya ketersinggungan atau adanya anggota yang merasa didiskriminasi oleh ketua kelompok.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Perempuan di Desa Tompotana, Kecamatan Mappakasunggu.

Dalam setiap upaya dalam pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat selalu saja ada faktor-faktor yang mempengaruhi, baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambatnya.

Terdapat beberapa faktor yang dianggap memiliki peran penting dalam pemberdayaan perempuan pedesaan, yaitu sebagai berikut;

5. Peran serta pemerintah, Pemerintah mempunyai andil yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, bagaimanapun dalam suatu masyarakat pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai power untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
6. LSM, saat ini banyak sekali LSM yang berkembang di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial. Sudah banyak peran nyata yang dilakukan LSM terutama dalam pemberdayaan perempuan yang mampu menjangkau hal-hal yang belum tersentuh program pemerintah.
7. Pembentukan Local Community Organization oleh perempuan, akan meningkatkan posisi bargaining perempuan. Di samping itu ketika mereka berkumpul mereka dapat merumuskan sendiri apa yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga dengan kesamaan tujuan program pemberdayaan akan lebih mudah mencapai sasaran.
8. Koperasi, koperasi merupakan sarana penting yang dapat membantu memperdayakan perempuan, terutama dalam meningkatkan kemampuan berorganisasi dan akses dalam memperoleh kredit.

Di desa Tompotana, dalam menjalankan program pemberdayaan perempuan, faktor-faktornya diketahui setelah menganalisis melalui hasil wawancara dengan orang-orang yang berada di desa Tompotana.

1. Penyadaran

Sebagaimana pernyataan oleh salah satu anggota LPM desa Tompotana yang berinisial AL.

"proses pemberian kesadaran bagi perempuan desa Tompotana selalu pemerintah maupun lembaga desa khususnya LPM dan PKK lakukan, hanya saja saat pelaksanaan kegiatannya masih ada hambatannya, hambatannya kadang kala karena kesibukan rumah tangga dan ada juga yang tidak percaya diri, merasa kapasitasnya rendah sehingga ia enggan untuk mengikuti kegiatan penyadaran yang pemerintah laksanakan." (hasil wawancara dengan AL, 17 Januari 2019, pukul 10.00 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara dengan AL tersebut dapat dianalisis bahwa pemerintah desa telah berupaya semampunya memberikan kesadaran bagi perempuan desa Tompotana namun masih ada hambatan-hambatan yang harus dilalui oleh pemerintah maupun lembaga desa Tompotana, dimana hambatan itu juga datang dari perempuan desa Tompotana itu sendiri.

2. Pelatihan

Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam memberdayakan perempuan desa Tompotana yang dalam bentuk pelatihan telah ada lebih dari satu jenis pelatihan, diantaranya:

- Pengolahan hasil tangkapan nelayan dan rumput laut menjadi makanan
- Pelatihan menjahit, dan
- Pelatihan mengurus jenazah.

Maka salah satu faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pelatihan telah dijelaskan oleh salah satu anggota lembaga PKK desa Tompotana yang berinisial R.

"ada beberapa hal yang seringkali menghambat pelaksanaan pelatihan bagi mereka yang telah terpilih dalam kelompok peserta pelatihan, sumberdaya manusia dan akses mereka dalam mengikuti pelatihan, seperti izin suami, kesibukannya mengurus rumah tangga. Hingga kadang pelaksanaan pelatihan

harus mengulur waktu. Adapun hal yang mendukung program pelatihan dalam pemberdayaan perempuan yaitu antusias dari peserta pelatihan itu sendiri" (hasil wawancara oleh R, 19 Januari 2019, pukul 10.00 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat di analisis bahwa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di desa Tompotana masih ada, baik faktor internal maupun faktor eksternal, sehingga pemerintah desa harus berperan ekstra demi kelancaran pelaksanaan program pemberdayaan perempuan desa Tompotana. Kemudian faktor pendukungnya bahwa antusiasme perempuan desa Tompotana sangat baik, hingga bisa mendorong perempuan-perempuan itu sendiri dalam mengupayakan agar hambatan-hambatan yang sebelumnya ada menjadi hilang.

3. Pengorganisasian

Berdasarkan pernyataan AN selaku Kaur Keuangan, faktor yang mendukung dan menghambat pengorganisasian program pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut.

"ada beberapa faktor yang mendukung, antara lain, kesediaan anggota pemberdayaan perempuan untuk diatur, diarahkan sehingga memudahkan proses pembentukan kelompok pemberdayaan. Adapun hambatannya yaitu peran lembaga desa dalam pembentukan kelompok pemberdayaan masih sangat minim, baik lembaga PKK itu sendiri maupun lembaga pemberdayaan masyarakat desa Tompotana. Partisipasi lembaga-lembaga desa masih butuh ditingkatkan lagi." (hasil wawancara oleh AN, 18 Januari 2019, pukul. 11.07 WITA).

Berdasarkan wawancara dengan AN diatas, dapat di analisis bahwa seluruh elemen berperan penting bagi kelancaran pelaksanaan program pemberdayaan perempuan desa Tompotana. Bahwa peran seluruh elemen mampu meminimalisir bahkan mampu menghilangkan hambatan-hambatan yang sebelumnya ada.

4. Pengembangan Kekuatan

Kekuasaan berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Bila masyarakat mempunyai kekuatan, setengah perjuangan untuk pembangunan sudah dimenangkan. Tetapi perlu ditekankan kekuatan itu benar-benar dari masyarakat bukan dari satu atau dua orang pemimpin saja. Kekuatan harus mengontrol kekuasaan para pemimpin.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Desa Tompotana yang berinisial AA menjelaskan upaya yang telah ditempuh pemerintah desa.

"dalam proses pengembangan kekuatan atau pengembangan potensi yang dimiliki oleh perempuan pasti ada hal-hal yang mendukung maupun menghambat. Adapun hal-hal yang mendukung seperti pemberian ruang khusus dalam pengambilan keputusan perencanaan desa, menumbuhkan kepercayaan diri perempuan dalam setiap kegiatan di desa. Kemudian hal-hal yang menghambat seringkali karena faktor internal dari perempuan itu sendiri, seperti sifat pesimis yang masih melekat dalam pikiran-pikiran mereka, juga sifat minderan yang perlu dihilangkan." (hasil wawancara oleh AA, 18 Januari 2019, pukul 10.45 WITA).

★ Berdasarkan hasil wawancara dengan AA diatas, dapat dianalisis bahwa pemberian ruang khusus bagi perempuan dalam mengasah potensi yang dimilikinya kemudian dikembangkan menjadi sesuatu yang menghasilkan dan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat khususnya perempuan itu sendiri, sudah tepat. Namun, setelah dibuatnya keputusan bagi pemberdayaan perempuan dalam perencanaan desa tadi, perlu dibuatkan wadah khusus untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut dengan pendampingan dan pengawasan maksimal hingga mampu menghasilkan program-program yang berkesinambungan. Begitupun dengan hambatan-hambatan yang disebutkan diatas, perlu upaya maksimal agar bisa diminimalisir bahkan dihilangkan.

5. Membangun Dinamika

Bahwa masyarakat atau perempuan itu sendiri yang memutuskan dan melaksanakan program-programnya sesuai dengan rencana yang sudah digariskan dan diputuskan sendiri. Artinya, ada pergerakan dalam kelompok pemberdayaan perempuan yang telah dibentuk.

Sementara itu, hambatan upaya pemerintah desa dalam membangun dinamika tersebut, serta peran pemerintah desa dan masyarakat dalam mengawal pengambilan keputusan kelompok pemberdayaan perempuan, telah dijelaskan oleh sekretaris desa Tompotana yang berinisial A.

"faktor pendukung yaitu pemerintah terus mendorong kelompok pemberdayaan perempuan dalam menjalankan program-program yang telah dibuatnya baik itu bagi peningkatan ekonomi maupun sosial-budaya. Kemudian peran pemerintah bersama masyarakat desa Tompotana memisahkan kepentingan perempuan dan kaum laki-laki serta memprioritaskan urusan kegiatan perempuan. Hambatan dalam membangun dinamika dalam pemberdayaan perempuan ini alhamdulillah kami rasa tidak ada." (hasil wawancara oleh A, 25 Januari 2019, pukul 14.00 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara dengan A diatas, dapat di analisis bahwa tidak ada faktor yang dapat menghambat upaya pemerintah membangun dinamika dalam kelompok-kelompok pemberdayaan perempuan serta peran serta masyarakat dalam memisahkan kepentingan perempuan dan kaum laki-laki serta memprioritaskan urusan kegiatan perempuan.

Dari seluruh hasil wawancara tentang faktor pendukung dan faktor penghambat dalam setiap indikator pemberdayaan perempuan diatas, maka dapat di analisis bahwa upaya pemerintah maupun perempuan itu sendiri dalam pemberdayaan kelompok perempuan desa Tompotana masih seringkali muncul hambatan-hambatan yang dapat memperlambat proses

pemberdayaan seperti peran lembaga desa yang masih sangat minim, peran lembaga swasta yang sudah tidak ada, sikap pesimis perempuan itu sendiri, akses dari keluarga seperti izin suami bagi yang sudah berkeluarga, dan lain sebagainya. Maka hal-hal seperti inilah yang perlu untuk pemerintah, masyarakat, lembaga desa, maupun perempuan itu sendiri bersama-sama mencari solusi.

Pemberdayaan tak semestinya hanya sekedar menjadi program yang oleh pemerintah desa, ketika telah terlaksana dan laporan pertanggungjawaban telah dibuat atau hanya sekedar penggugur kewajiban pemerintah lantas semua selesai. Pemerintah harus juga memikirkan kelanjutan dari program-program pemberdayaan bagi masyarakat khususnya perempuan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya tentang Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan di Desa Tompotana Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai indikator Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat bagi pemberdayaan perempuan di desa Tompotana.

Dalam pemberian kesadaran kepada perempuan desa Tompotana telah diterapkan dengan baik oleh pemerintah, meskipun masih belum maksimal, pemerintah maupun perempuan masih berfokus pada hambatan-hambatan yang dihadapi bukan pada pencarian solusinya. Kemudian bagi pelaksanaan pelatihan juga telah dilaksanakan namun masih tidak mempengaruhi tingkat perekonomian kelompok kaum perempuan.

Pada prinsip Pengorganisasian juga berjalan dengan baik, namun dalam penerapannya peran lembaga pemerintah desa Tompotana masih sangat kurang, meskipun demikian peran masyarakat sangat membantu bagi terlaksananya program pemerintah bagi pemberdayaan perempuan. Begitupun dalam prinsip Pengembangan Kekuatan yang berjalan dengan baik dengan adanya upaya-upaya dari pemerintah. Namun pelaksanaannya masih belum maksimal.

Prinsip Membangun Dinamika juga berjalan dengan baik. Meskipun masih sering terjadi ketidak samaan pendapat antara ketua kelompok dengan anggota, masih sering terjadi namun demikian dinamika tetap ada.

2. Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di desa Tompotana.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di desa Tompotana, baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat. Adapun faktor pendukung pemberdayaan perempuan desa Tompotana antara lain adanya regulasi berupa peraturan menteri dan UUD 1945, adanya partisipasi perempuan, adanya peran pemerintah, lembaga desa, PKK, dan Masyarakat, ketersediaan anggaran bagi pemberdayaan perempuan. Kemudian faktor penghambatnya dipengaruhi oleh perempuan itu sendiri seperti tidak ada izin dari suami bagi ibu-ibu yang berkeluarga, kesibukan rumah tangga, dan rasa pesimis atau tidak percaya diri perempuan.

Penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan perempuan sudah berjalan sesuai dengan Permen No. 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 3 (b) mendorong keterlibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan; (d) mendorong program-program yang dapat meningkatkan kemandirian perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, serta bidang strategis lainnya. Serta Undang-Undang Dasar 1945 yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah pada dasarnya mengandung prinsip persamaan hak dan kewajiban bagi laki-laki maupun perempuan tanpa adanya perbedaan

dalam segala bidang. Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti memiliki saran terkait pemberdayaan perempuan di desa Tompotana yaitu:

- a) Pemerintah harus senantiasa memberikan pemahaman pada masyarakat akan pentingnya pemberdayaan bagi perempuan khususnya perempuan yang masih kurang mempedulikan perkembangan ekonomi desa Tompotana maupun untuk dirinya sendiri.
- b) Pemerintah harus lebih kreatif dalam memilih dan membuat program pemberdayaan bagi perempuan desa Tompotana agar program tersebut bisa berlangsung lama sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa Tompotana khususnya bagi perekonomian desa.
- c) Pemerintah desa harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya perempuan supaya bisa lebih meningkatkan partisipasinya pada program pemberdayaan perempuan desa Tompotana.
- d) PKK harus lebih aktif lagi dalam memberikan motivasi kepada perempuan untuk lebih aktif lagi menyuarakan pendapatnya dalam forum-forum tertentu terkhusus pada forum diskusi bagi pemberdayaan perempuan desa Tompotana.

- e) Sebelum kegiatan dilaksanakan, pemerintah desa harus memberikan informasi jauh hari agar masyarakat khususnya perempuan lebih bisa mempersiapkan diri.
- f) Agar supaya pemerintah meminimalisir faktor faktor yang bisa menghambat partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan dan mengoptimalkan faktor-faktor pendukung partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan perempuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2012 (Edisi Revisi). *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Agnes, Dkk. (2016). "Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa". Jurusan Sosiologi". *Jurnal Empirika* Vol 1 (2)
- Ambarsari, Wiwik. 2014. *Pemberdayaan Perempuan*. Indramayu: Universitas Wiralodra Indramayu
- Foilyani, Farida Hydro, dkk. 2009. *Pemberdayaan Perempuan Perdesaan dalam Pembangunan (Studi Kasus Perempuan Di Desa Samboja Kuala, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara)*. Disertasi Program Magister Ilmu Administrasi Bisnis, PPSUB.
- Mardikanto, Totok. 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Martina. 2016. *Prinsip-Prinsip dan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Masruhen, Dkk. (2013). "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2013 (Studi Di Desa Koncer Darul Aman Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso)". Jurusan Ilmu Administrasi". Vol 1 (1)
- Mesfriati, Sari. 2009. *Analisa Implementasi*. FISIP Universitas Indonesia.
- Rosdiana, Weni. 2015. *Analisis Pemberdayaan Perempuan*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Saptaningsih, Rosalia Indriyati, dkk 2015. *Pemberdayaan perempuan desa untuk mengurangi kemiskinan*. Yogyakarta: universitas PGRI Yogyakarta.
- Sarwono, J. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graham Ilmu. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Retika Adhitama.
- Supeni, Retno Endah dan Maheni Ika Sari. 2011. *Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Pengembangan Manajemen Usaha Kecil (Studi Diskriptif Pada Kegiatan Usaha Kecil Ibu-Ibu Desa Wirolegi Kabupaten Jember, Dampingan Pusat Studi Wanita UM Jember)*. Universitas Muhammadiyah Jember.

Susilawati, E. 2014. *Program Pemberdayaan Lingkungan Sosial Warga KAT Desa Bonai*. Riau: Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga

Tri Kartono, Drajat dan Hanif Nurcholis. 2009. *Konsep dan Teori Pembangunan*. Yogyakarta: Graham Ilmu.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (1)

Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Pergeseran Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Permen No. 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak





PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. H. Padjonga Daeng Ngalle No.3 Kabupaten Takalar

Takalar, 19 Desember 2018

Nomor : 070/625/KKBP-XII/2018
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a,
Yth. Kepala Desa Tompotanah
Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar
Di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar nomor : 438/05/C.4-VIII/XII/37/2018, Tanggal 17 Desember 2018 Perihal izin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : SYAMSINAR
Tempat/Tanggal Lahir : Takalar, 17 Mei 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Lembaga : Mah. (S.1) UNISMUH Makassar
Alamat : Tompotana Desa Maccinibaji Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar

Bernaksud akan mengadakan penelitian di kantor/instansi/wilayah kerja Bapak/Ibu dalam Rangka Penyusunan *Skripsi* dengan judul :

**"PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEMBANGUNAN DI DESA TOMPOTANAH
KECAMATAN MAPPAKASUNGGU KABUPATEN TAKALAR"**

Yang akan dilaksanakan : 22 Desember 2018 s/d 22 Februari 2019
Pengikut / Peserta : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Takalar;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
3. Menanti sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 set foto duplikat foto copy hasil *Skripsi* kepada Bupati Takalar Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Takalar;
5. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan secerlanya.



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Up. Ka. Badan Kesbang Prov. Sulsel di Makassar;
2. Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporan);
3. Para Anggota FORKOPINDA Kab. Takalar masing-masing di Takalar;
4. Kepala Bapelitbang Kab. Takalar di Takalar;
5. Camat Mappakasunggu Kab. Takalar di Takalar;
6. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
7. Sdr.(i) SYAMSINAR di tempat.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 860972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

: 1875/FSP/A.1-VIII/XII/1440H/2018 M
: 1 (satu) Eksemplar
: Pengantar Penelitian

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Syamsinar
S t a m b u k : 105640193214
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Desa Tompotanah, Kecamatan Mappakasunggu
Kabupaten Takalar.
Judul Skripsi : *"Pemberdayaan Perempuan Pembangunan di Desa
Tompotanah, Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten
Takalar"*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.
Wasalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 15 Desember 2018
D e k a n,
Ub. Wakil Dekan I


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Dekan,
Ub. Wakil Dekan I
1883 366

